

## **MANAJEMEN PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2022**

**Sri Wahyuni**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda, Pekanbaru, Riau, Indonesia

\*e-mail: [peksosriau.sriwahyuni@gmail.com](mailto:peksosriau.sriwahyuni@gmail.com)

### **Abstrak**

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya tindak lanjut dan penanganan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar sehingga masih banyak anak terlantar di Kota Pekanbaru yang belum menemukan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori normatif berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022. Subyek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab di bidang rehabilitasi sosial dan anak. perlindungan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data kualitatif dengan cara merangkum, mengkategorikan dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap PPKS termasuk anak terlantar yang dimulai dari pendekatan awal, pengkajian, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, rujukan. , dan penghentiannya sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang juga didukung dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya saja masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat faktor pendukung yang cukup membantu pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, seperti anggaran yang tersedia, pegawai dan pekerja sosial yang profesional, kerjasama yang baik dengan instansi terkait lainnya, seperti kerjasama dengan Aparatur Sipil Negara. Satuan Polisi akan menggerebek dan juga mencari anak-anak. -anak terlantar yang masih berada di jalanan Kota Pekanbaru dan juga lingkungan yang kondusif. Pelayanan rehabilitasi sosial mempunyai kelemahan pada sarana dan prasarana pelayanan sosial serta kurangnya kualitas sumber daya manusia penyelenggara rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.

**Kata kunci:** Penyelenggaraan, Pelayanan Publik, Rehabilitasi Sosial, Anak Terlantar

### **Abstract**

*Social rehabilitation services are one of the duties of the Pekanbaru City Social Service in increasing protection and social rehabilitation services for neglected children. The problem in this research is the lack of follow-up and handling from the Pekanbaru City Social Service for abandoned children so that there are still many abandoned children in Pekanbaru City who have not found their families. This study aims to describe and find out the inhibiting factors for the implementation of social rehabilitation services for neglected children by the Pekanbaru City Social Service in 2022. This study uses normative theory in the form of Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2020 concerning basic social rehabilitation for neglected children. This type of research is descriptive qualitative in nature to describe and explain the implementation of social rehabilitation services for neglected children by the Pekanbaru City Social Service in 2022. The subject of this research is the Pekanbaru City Social Service which is responsible for social rehabilitation and child protection. Data collection methods used in this study were interviews and documentation. Data analysis was carried out by analyzing qualitative data by summarizing, categorizing and drawing conclusions. The results of this study are the stages of implementing social rehabilitation services for abandoned children carried out by the Pekanbaru City Social Service, which is an effort by the Pekanbaru City Government as a form of responsibility and concern for PPKS, including abandoned children, starting from the initial approach, assessment, intervention planning, intervention, evaluation, referral. , and the termination is in accordance with the implementation in the field which is also supported by the rules set by the Pekanbaru City Government,*

*it's just that there are still some obstacles in its implementation. As for the implementation of public services, there are supporting factors that are sufficient to assist the implementation of social rehabilitation services, such as the available budget, professional employees and social workers, good cooperation with other relevant agencies, such as cooperation with the Civil Service Police Unit to raid and also search for children. -abandoned children who are still on the streets of Pekanbaru City and also a conducive environment. Social rehabilitation services have weaknesses in social service facilities and infrastructure and also a lack of quality human resources for social rehabilitation administrators for neglected children.*

**Keywords:** *Implementation, Public Service, Social Rehabilitation, Abandoned Children.*

## **PENDAHULUAN**

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Kategori usia anak dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pada pasal 1 ayat 2 di jelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kemudian, usia anak terlantar menurut Kementerian Sosial RI yaitu berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Hal inilah yang kadang membuat anak terlantar sering hidup dan berkembang dibawah tekanan dari stigma atau dicap sebagai pengganggu ketertiban, yang diperlukan oleh anak-anak tersebut adalah sebagaimana kebutuhan anak-anak pada umumnya, yaitu perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang termasuk kedalam fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan (*Service*). Rehabilitasi sosial bagi anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, pelayanan aksesibilitas, bantuan, dan rujukan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya, melimpahkan kewenangan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar kepada bidang rehabilitasi sosial, sebagaimana tertera pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada pasal 16 ayat 2 huruf f, dijelaskan tugas bidang rehabilitasi sosial pada Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak yaitu perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.

Dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menangani tujuh kluster anak di bidang rehabilitasi sosial, hal ini dapat dilihat pada data jumlah kluster kasus anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2015 s/d 2021 yaitu :

### **Tabel**

#### **Data Anak Terlantar Kota Pekanbaru Tahun 2015 s/d 2021**

<b>PPKS Kategori (Anak Terlantar)</b>	<b>Jumlah</b>
Tahun 2015	258
Tahun 2016	202
Tahun 2017	187
Tahun 2018	283
Tahun 2019	11
Tahun 2020	1
Tahun 2021	13
Tahun 2022	15

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penanganan anak terlantar masih kurang efektif, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Di tahun 2020, jumlah anak terlantar menurun drastis yaitu berjumlah 1 anak. Akan tetapi, di tahun 2021 terjadinya peningkatan jumlah anak terlantar yaitu 13 anak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya penanganan serta penelusuran anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga kembali terjadinya peningkatan jumlah anak terlantar yang harus ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani kasus anak terlantar yaitu berupa edukasi. Namun faktanya setelah diberikan edukasi tidak banyak yang menerapkannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental dan sosialnya yang kurang baik serta rendahnya faktor ekonomi. Dengan adanya faktor tersebut, hal ini bisa menyebabkan peningkatan jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru.

Permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam menangani kasus anak terlantar ialah sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti. Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada di lingkungan jalanan sehingga memiliki cap buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal, serta dituntut bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dari permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021".

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah penelitian yang akan dilakukan adalah : 1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021 ? 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021 ?

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat pada pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data

sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga sumber data yang terdiri dari informan penelitian, media massa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2021 yaitu susah untuk melakukan informasi penelusuran pihak keluarga yang memakan waktu lama terutama pada anak yang berusia kecil yang masih susah untuk ditanya atau sulit untuk menggali informasi dan memakan cukup waktu lama untuk memberikan terminasi terhadap anak tersebut terkecuali anak yang sudah berusia di atas umur 14 tahun itu bisa langsung di asesmen (*assessment*) mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti.

Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada dilingkungan jalanan sehingga memiliki cap buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada dilingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal, serta di tuntutan bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak terlantar.

Faktor penghambat pada pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menggunakan kecakapan, peralatan dan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Dengan analisis SWOT yang didapat dari data RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari dalam maupun tantangan dan ancaman dari luar lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021, dimana penjelasan yang dipaparkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar pada pasal 2 ayat 5 dijelaskan bahwa tahapan pelayanan rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yaitu : (1) Pendekatan Awal, (2) Asesmen, (3) Perencanaan Intervensi, (4) Intervensi, (5) Evaluasi, Rujukan, dan Terminasi.

Peneliti menggunakan teori normatif dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar dikarenakan pelayanan pada anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggunakan pedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2020. Dan dalam penelitian ini, pelayanan rehabilitasi sosial pada anak terlantar di Kota Pekanbaru dilayani oleh pekerja sosial yang ada di dalam Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, pekerja sosial merupakan sumber daya manusia yang direkomendasikan oleh Kementerian Sosial dalam layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelayanan rehabilitasi sosial memiliki kelemahan dari sarana dan prasarana pelayanan sosial dan juga masih kurangnya kualitas sumber daya manusia petugas penyelenggara rehabilitasi sosial pada anak terlantar. Oleh sebab itu, shelter atau rumah singgah sementara yang terdapat di dalam Dinas Sosial belum bisa menampung dalam jangka waktu yang lama untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat hidup bagi anak-anak terlantar, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki SOP pada anak-anak terlantar yang sedang dilakukan asesmen pada mereka hanya berjangka waktu 3 bulan. Dari faktor tersebut, panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat memberikan tempat untuk hidup bagi anak-anak terlantar yang belum ditemukannya keluarga mereka.

## **SIMPULAN**

Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka diperoleh kesimpulan :

1. Pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dalam tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada PPKS termasuk anak terlantar yang dimulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, rujukan, dan terminasi sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang juga didukung dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya saja masih terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya. Adapun dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat faktor pendukungnya yang cukup membantu pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial seperti anggaran yang tersedia, pegawai dan pekerja sosial yang profesional, kerja sama yang baik dengan instansi lain yang terkait seperti kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk merazia dan juga mencari anak-anak terlantar yang masih ada dijalanan Kota Pekanbaru dan juga lingkungan sekitar yang kondusif.
2. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2021 yaitu susahnya untuk melakukan informasi penelusuran pihak keluarga yang memakan waktu lama terutama pada anak yang berusia kecil yang masih susah untuk ditanya atau sulit untuk menggali informasi dan memakan cukup waktu lama untuk memberikan terminasi terhadap anak tersebut terkecuali anak yang sudah berusia di atas umur 14 tahun itu bisa langsung di asesmen (assessment) mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti. Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada dilingkungan jalanan sehingga memiliki cap buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada dilingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal, serta di tuntutan bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak terlantar. Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelayanan rehabilitasi sosial memiliki kelemahan dari sarana dan prasarana pelayanan sosial dan juga masih kurangnya kualitas sumber daya manusia petugas penyelenggara rehabilitasi sosial pada anak terlantar. Oleh sebab itu, shelter atau rumah singgah sementara yang terdapat di dalam Dinas Sosial belum bisa menampung dalam jangka waktu yang lama untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat hidup bagi anak-anak terlantar, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki SOP pada anak-anak terlantar yang sedang dilakukan asesmen pada mereka hanya berjangka waktu 3 bulan. Dari faktor tersebut, panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru keluarga mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmata, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Prastowo. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.
- Dahlan, H. (2008). *Dinamika anak terlantar: keniscayaan di Panti Sosial Bina Remaja*. Yogyakarta. B2P3KS Press.

- Depsos RI. (2006). Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial. Jakarta: Depsos RI.
- Departemen Sosial RI, (2008). Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dengan Kecacatan Rungu Wicara. Jakarta: Depsos RI.
- Djihad, Hisyam & Suyanto. (2000). Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III. Yogyakarta: Adi Cita.
- Enni Hardiati. (2010). Sebuah Kepedulian Terhadap Anak Terlantar (Study Kasus Tentang Pengasuhan Anak Terlantar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Deslyanto, M. (2016). Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pembinaan Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP, 3 (2).
- Nagaring, D.D. Sambiran, S. & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). JURNAL GOVERNANCE, 1 (2).
- Pertiwi, K. B. & Sauri, R. S. (2020). Implementasi Kebijakan Dan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Jawa Barat Dalam Pengentasan Anak Terlantar Melalui Sistem Pendidikan Dalam Panti. Nusantara Education Review, 3(2).
- Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, US